

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH ERITREA
YANG MEMENJARAKAN DAN MENGANIAYA KELOMPOK AGAMA
YANG TIDAK DIAKUI DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Nama : Marsha Vincentia

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Wisnu Dewanto, S.H., LL.M.,LL.M. dan Muhammad Insan
Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang melekat pada manusia yang keberadaannya tidak boleh diganggu gugat. Negara pun menjadi aktor yang wajib menghormati dan melindungi hak ini. Akan tetapi, kenyataan Eritrea justru melakukan pelanggaran dengan melakukan pemenjaraan dan penganiayaan terhadap kelompok agama yang tidak diakui. Padahal Eritrea sendiri menjadi salah satu negara yang meratifikasi ICCPR di mana di dalam pasal 18 terdapat kewajiban negara pihak untuk melindungi serta menjamin kebebasan setiap manusia untuk memilih agama dan menjalankan agama tersebut. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pendekatan secara *statute approach* dan pendekatan secara *conceptual approach*.

Kata kunci : Eritrea, Kebebasan Beragama, ICCPR

JURIDICIAL ANALYSIS OF ERITREA GOVERNMENT ACTIONS
IMPRISONING AND PERSECUTING UNRECOGNIZED RELIGIOUS
GROUPS REVIEWED BY INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Name : Marsha Vincentia

Discipline / Study Programme : Hukum / Ilmu Hukum

Contributor : Dr. Wisnu Dewanto, S.H., LL.M., LL.M. and Muhammad Insan
Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Religious freedom is fundamental right attached on creatures where the existence should never be bothered. State become a actor who obligate to respect and protect this right. However in the fact, Eritrea did violations with this right. Eritrea imprisoned and persecuted toward unrecognized religious groups. Meanwhile, Eritrea is one of states that already ratified ICCPR where in article 18 ICCPR contains that state parties must protect and guarantee the freedom of every human to choose and manifest his religion. The type of research used is normative juridical research. The problem approach in this writing is carried out using 2 (two) ways, namely a statute approach and a conceptual approach.

Keywords : Eritrea, Religious Freedom, ICCPR